Kemerdekaan di Tengah Pandemi

Ismail Suardi Wekke

(Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong)

Kemerdekaan yang kita rayakan hari ini, di tengah wabah Covid-19. Betapa dalam lima bulan terakhir, berguguran anak-anak bangsa. Di tengah kesyukuran kemerdekaan, ada ketidakberdayaan dalam mengatasi bencana.

Kita sudah merdeka dari penjajah dari bangsa lain. Kita sepenuhnya merdeka dari pemerintahan bangsa lain. Namun masih dijajah, kemiskinan dan kebodohan masih menjadi kawan akrab sehari-hari.

Pandemi mendera kita kembali. Masyarakat yang terpapar bukannya berkurang, tapi bertambah. Menyebar ketakutan. Prasangka pada tenaga medis menghiasi halaman media sosial.

Sebagai bangsa, kita tak berdaya. Justru yang wujud adalah saling menyalahkan. Bahkan ketidakpercayaan kepada otoritas mulai muncul. Pengambilan paksa mayat di rumah sakit, mulai dari Ambon, Sorong, dan juga di Makassar.

Belum lagi infrastruktur Pendidikan yang sepenuhnya compang-camping. Ada daerah dimana penduduk yang tidak memiliki akses pada internet. Sementara Pendidikan dilaksanakan dengan metode daring. Akhirnya, seorang anak bangsa harus berkelang tanah ditengah ikhtiar mendapatkan akses signal untuk kuliah, ironi pendidikan.

Amanah pendirian bangsa untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak serasa semakin dekat. Justru, ikhtiar mewujudkan itu, menjadi jauh rasanya. Iya, ini soal rasa saja. Bagi penguasa yang memiliki pendapatan, pastinya akan memiliki pendapat yang berbeda.

Di negeri ini, pendapatan akan berhubungan dengan pendapat. Bisajadi, pendapat akan berkurang dengan semakin meningginya pendapatan. Sementara pendapat yang meningkat, karena pendapatan yang menipis.

Sementara pesohor menyuarakan ketidakpercayaan terhadap kondisi pandemi yang disebutnya sebagai konspirasi semata. Warga dan otoritas yang tak saling menaruh kepercayaan. Ini sebuah tragedi semasa menyambut bulan kemerdekaan.

Komunikasi dengan warga yang mandeg. Belum lagi, olok-olok terhadap pemegang tampuk kekuasaan bersileweran di dunia maya. Bahkan dijadikan candaan, dan juga perisakan.

Terlihat ada warganet yang bahkan mengetikkan kata anjing untuk memberi respon pada kuasa kesehatan. Pesohor yang sama, menyebut kementerian yang mengurus soal sehat sebagai kacung badan dunia.

Negeri yang gaduh, segaduh-gaduhnya. Ketika masih berada di tengah pandemi, justru pertikaian yang muncul. Belum lagi soal keberatan ketika memaknai logo kemerdekaan kali ini, sebagai simbol agama tertentu.

Tenaga yang dimiliki bukannya digunakan untuk mengatasi bencana, justru saling menyalahkan dan keributan yang terjadi. Silang pendapat terjadi, dan pada gilirannya terasa gaduh dan bukan pada inti masalah.

Satu masalah kita sebagai bangsa, ketidakpercayaan dan juga kolaborasi. Idealnya, justru dengan usia kemerdekaan yang sudah memasuki tahun ke-75, kohesi sosial semakin terjalin.

Daya sanding dengan bangsa lain, sebagai contoh dalam sepakbola tidaklah wujud. Terakhir, tahun 1991, medali emas sepakbola dikalungkan ke Indonesia. Setelahnya, finalpun tidak pernah terjepit lagi.

Ini bisa menjadi mitsal, dimana tidak adanya kerjasama. Untuk menjadi juara dunia badminton, cukup dengan dua orang pemain. Sementara sepakbola diperlukan sebelas orang. Belum lagi keriuhan penonton yang kerap membuat rusuh.

Otonomi daerah yang dicanangkan dua puluh tahun lalu, sudah mengakar dalam bentuk tanggungjawab kewilayahan. Senyatanya, justru terjadi adalah raja-raja kecil. Suami istri bersisian menjadi kepala daerah, dan juga ketua DPRD.

Pada kesempatan selanjutnya, pasangan suami istri yang bupati dan ketua DPRD ditangkap dalam operasi tangkap tangan atas persekongkolan anggaran. Bukannya bersama-sama mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, justru mempertebal kantongnya sendiri.

Kekerabatan menjadi tolok ukur untuk rekrutmen pengelola negara. Bukan pada meritokrasi. Pada saat yang sama, keuangan Yang Maha Esa. Uang menjadi tuhan dan tuan dalam proses demokratisasi.

Padahal dalam berbangsa, tanggungjawab diemban bersama. Untuk urusan pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, dilimpahkan ke bupati atau walikota. Sementara sekolah menengah atas dan juga kejuruan menjadi kewenangan provinsi.

Apa yang wujud? Masyarakat justru menumpukan Pendidikan hanya pada presiden dan menteri pendidikan. Sementara, Pendidikan merupakan urusan bersama dan sepenuhnya.

Dalam mendapatkan surat rekomendasi partai bagi mendaftar untuk calon kepala daerah, mesti menyetorkan sejumlah uang. Begitu surat sudah digunakan, sang calonpun tetap harus membayar suara rakyat.

Betapa, uanglah yang menjadi tuan. Bukan cita-cita bersama, untuk kemajuan bersama. Rasa-rasanya, masalah demi masalah berulang. Bukannya kemajuan demi kemajuan.

Masalah yang terjadi, kemudian diselesaikan, idealnya tidak terulang kembali. Tetapi ketika politik menjadi panglima, justru ini diulangi ketika kesempatan yang berhubungan kursi yang berpeluang didapatkan.

Ironi demi ironi, justru menghiasi keseharian. Bukannya capaian demi capaian. Ini semua bertumpu pada sendi-sendi sosial yang rapuh. Untuk sebuah kemajuan, kesalingpercayaan dan juga kebersamaan menjadi dua pilar yang perlu ditegakkan.

Bencana dan kemerdekaan menjadi momentum untuk berbenah. Wabah menjadi katalisator untuk menelisik kembali urusan berbangsa dan bernegara. Selama ini, dalam banyak hal kita abai. Menuju satu abad Indonesia, optimisme untuk kemajuan bangsa perlu dipupuk sekarang juga. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia Ke-75, merdeka.